

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan berawal dari tahap perencanaan yang menjadi landasan sekaligus pemandu arah pembangunan guna mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tawangharjo. Tahap ini dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Penyusun Renja Kecamatan Tawangharjo;
 - b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tawangharjo;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Kecamatan Tawangharjo.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Tawangharjo
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tawangharjo dan mengevaluasi capaian Renja Kecamatan Tawangharjo tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tawangharjo.
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kecamatan Tawangharjo, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Grobogan. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Lintas Sektoral.
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tawangharjo.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Tawangharjo.
Tahap ini dilakukan dalam rangka mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Kecamatan Tawangharjo disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
 - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana kerja dan pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Tawangharjo.
Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tawangharjo Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud
Rancangan Awal Renja Kecamatan Tawangharjo disusun sebagai dokumen awal yang selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi rancangan renja dan renja yang menjadi pedoman dan arah bagi Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Tawangharjo.
- Tujuan
Rancangan Awal Renja Kecamatan Tawangharjo disusun agar tujuan dan sasaran Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan tahun 2024 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan pada struktur anggarannya memiliki 2 program dan 7 kegiatan serta 16 Sub kegiatan, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terkait (Musrenbang Kecamatan)
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - 1) Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022
KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN

| No | Kode | Program/Kegiatan | Satuan | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021 | | | | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | | | REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | Pelaksana |
|---|------|---|-----------|---|----------------|--|---------------|--|---------------|---|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|-----------------|
| | | | | Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | | | Nilai IKM | 83,88 | 13.439.653.473 | 85 | 1.486.321.490 | 82,7 | 2.583.582.000 | 88,75 | 2.225.992.332 | 107% | 86,16% | 82,8 | 3.712.313.822 | 99% | 27,62% | |
| Sasaran-1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | | | Nilai IKM | 83,88 | 13.439.653.473 | 85 | 1.466.369.942 | 82,7 | 2.583.582.000 | 88,75 | 2.201.200.332 | 107% | 85,20% | 82,8 | 3.667.570.274 | 99% | 27,29% | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai | 73,5 | 13.046.618.473 | 66 | 1.466.369.942 | 66 | 2.504.975.000 | 66 | 2.180.561.332 | 100% | | 66 | 3.646.931.274 | 90% | 27,95% | |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 | | 100 | 14.487.000 | 100 | - | 100 | | 100% | | 100 | 14.487.000 | 100% | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 | | 1 | 14.487.000 | 1 | - | 1 | | 100% | | 1 | 14.487.000 | 100% | | Subbag Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 1 | | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 1 | - | 100% | | Subbag Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | dokumen | 1 | | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 1 | - | 100% | | Subbag Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | dokumen | 1 | | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 1 | - | 100% | | Subbag Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dokumen | 1 | | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 1 | - | 100% | | Subbag Keuangan |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen | 1 | | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 1 | - | 100% | | Subbag Keuangan |

| No | Kode | Program/Kegiatan | Satuan | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021 | | | | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | | | REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | Pelaksana |
|----|------|---|---------|---|---------------|--|-------------|--|---------------|---|---------------|--|----|--|---------------|--|--------|-----------------------------|
| | | | | Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100 | 9.956.278.473 | 100 | 928.305.312 | 100 | 1.886.907.000 | 100 | 1.330.820.532 | 100% | | 100 | 2.259.125.844 | 100% | 22,69% | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 14 | 9.956.278.473 | 14 | 928.305.312 | 14 | 1.886.907.000 | 14 | 1.330.820.532 | 100% | | 14 | 2.259.125.844 | 100% | 22,69% | Subbag Keuangan |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | bulan | 12 | - | 12 | | 12 | - | 12 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | dokumen | 12 | - | 12 | | 12 | - | 12 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Keuangan |
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | 12 | - | 12 | | 12 | - | 12 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | dokumen | 12 | - | 12 | | 12 | - | 12 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Keuangan |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | dokumen | 12 | - | 12 | | 12 | - | 12 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Keuangan |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | - | 100 | | 100 | - | 100 | | 100% | | 100 | - | 100% | | |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | dokumen | 10 | - | 10 | | 10 | - | 10 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | unit | 111 | - | 111 | | 111 | - | 111 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | orang | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 100 | 72.500.000 | 100 | 22.680.000 | 100 | 14.500.000 | 100 | 16.620.000 | 100% | | 100 | 39.300.000 | 100% | 54,21% | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | stel | 30 | - | 30 | | 30 | - | 30 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | stel | 30 | 72.500.000 | 30 | 22.680.000 | 30 | 14.500.000 | 30 | 16.620.000 | 100% | | 50 | 39.300.000 | 167% | 54,21% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 30 | - | 30 | | 30 | - | 30 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 30 | - | 30 | | 30 | - | 30 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |

| No | Kode | Program/Kegiatan | Satuan | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021 | | | | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | | | REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | Pelaksana |
|----|------|--|--------|---|---------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--|----|--|-------------|--|--------|-----------------------------|
| | | | | Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | 100 | 1.180.285.000 | 100 | 344.406.998 | 100 | 236.057.000 | 100 | 251.352.410 | 100% | | 100 | 595.759.408 | 100% | 50,48% | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | unit | 35 | 36.075.000 | 35 | 7.251.000 | 35 | 7.215.000 | 35 | 7.215.000 | 100% | | 30 | 14.466.000 | 86% | 40,10% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | unit | 10 | - | 10 | 100.576.998 | 10 | - | 10 | | 100% | | 0 | 100.576.998 | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | unit | 10 | - | 10 | | 10 | - | 10 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | unit | 20 | 395.700.000 | 20 | 78.300.000 | 20 | 79.140.000 | 20 | 78.587.000 | 100% | | 20 | 156.887.000 | 100% | 39,65% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | unit | 10 | 68.450.000 | 10 | 22.270.000 | 10 | 13.690.000 | 10 | 13.806.910 | 100% | | 10 | 36.076.910 | 100% | 52,71% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | unit | 12 | 63.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.600.000 | 12 | 12.600.000 | 100% | | 12 | 24.600.000 | 100% | 39,05% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Bahan/Material | unit | 20 | 192.360.000 | 20 | 37.709.000 | 20 | 38.472.000 | 20 | 38.694.000 | 100% | | 20 | 76.403.000 | 100% | 39,72% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | 40 | 424.700.000 | 40 | 86.300.000 | 40 | 84.940.000 | 40 | 100.449.500 | 100% | | 36 | 186.749.500 | 90% | 43,97% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | unit | 5 | - | 5 | | 5 | | 5 | | 100% | | | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 314.905.000 | 100 | | 100 | 62.981.000 | 100 | 47.350.000 | 100% | | 100 | 47.350.000 | 100% | 15,04% | |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | unit | | - | | | | | | | #DIV/0! | | | - | #DIV/0! | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | | - | | | | | | | #DIV/0! | | | - | #DIV/0! | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Mebel | unit | 10 | - | 10 | | 10 | - | 10 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |

| No | Kode | Program/Kegiatan | Satuan | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021 | | | | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | | | REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | Pelaksana |
|----|------|---|--------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--|----|--|-------------|--|--------|-----------------------------|
| | | | | Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | unit | 10 | 314.905.000 | 10 | | 10 | 62.981.000 | 10 | 47.350.000 | 100% | | 10 | 47.350.000 | 100% | 15,04% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | unit | 10 | - | 10 | | 10 | - | 10 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | unit | 10 | - | 10 | | 10 | - | 10 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 1 | - | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 1 | - | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 1 | - | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | 808.305.000 | 100 | 123.111.632 | 100 | 161.661.000 | 100 | 145.062.390 | 100% | | 100 | 268.174.022 | 100% | 33,18% | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | bulan | 12 | 360.000.000 | 12 | 72.148.838 | 12 | 72.000.000 | 12 | 70.775.000 | 100% | | 12 | 142.923.838 | 100% | 39,70% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | 12 | 92.500.000 | 12 | 13.871.300 | 12 | 18.500.000 | 12 | 15.753.658 | 100% | | 12 | 29.624.958 | 100% | 32,03% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bulan | 12 | 38.460.000 | 12 | 7.692.000 | 12 | 7.692.000 | 12 | | 100% | | 12 | 7.692.000 | 100% | 20,00% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | bulan | 12 | 317.345.000 | 12 | 29.399.494 | 12 | 63.469.000 | 12 | 58.533.732 | 100% | | 12 | 87.933.226 | 100% | 27,71% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100 | 714.345.000 | 100 | 33.379.000 | 100 | 142.869.000 | 100 | 389.356.000 | 100% | | 100 | 422.735.000 | 100% | 59,18% | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | unit | 6 | 109.455.000 | 6 | 21.891.000 | 6 | 21.891.000 | 6 | 17.941.000 | 100% | | 6 | 39.832.000 | 100% | 36,39% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan Mebel | unit | | - | | | | - | | | #DIV/0! | | 50 | - | #DIV/0! | | Subbag Umum dan Kepegawaian |

| No | Kode | Program/Kegiatan | Satuan | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021 | | | | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | | | REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | Pelaksana |
|----|------|---|-----------|---|-------------|--|------------|--|-------------|---|-------------|--|----|--|-------------|--|--------|-----------------------------|
| | | | | Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | unit | 12 | 58.890.000 | 12 | 11.488.000 | 12 | 11.778.000 | 12 | 9.174.000 | 100% | | 12 | 20.662.000 | 100% | 35,09% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | unit | 12 | - | 12 | | 12 | - | 12 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | unit | 1 | 546.000.000 | 1 | | 1 | 109.200.000 | 1 | 191.816.000 | 100% | | 1 | 191.816.000 | 100% | 35,13% | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 1 | - | 1 | | 1 | - | 1 | 170.425.000 | 100% | | 0 | 170.425.000 | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 1 | - | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Subbag Umum dan Kepegawaian |
| | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persen | 100 | 103.195.000 | 100 | | 100 | 20.639.000 | 100 | 20.639.000 | 100% | | 100 | 20.639.000 | 100% | 20,00% | |
| | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persen | 100 | 103.195.000 | 100 | 0 | 100 | 20.639.000 | 100 | 20.639.000 | 100% | | 100 | 20.639.000 | 100% | 20,00% | |
| | | 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan) | Kali | 1 | 103.195.000 | 1 | 0 | 1 | 20.639.000 | 1 | 20.639.000 | 100% | | 1 | 20.639.000 | 100% | 20,00% | Seksi PMD |
| | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persen | | - | | 0 | | - | | | | | | - | | | |
| | | 7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Dok | | - | | 0 | | | | | | | | - | | | Seksi PU |
| | | 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Indikator | | - | | 0 | | | | | | | | - | | | Seksi PU |

| No | Kode | Program/Kegiatan | Satuan | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021 | | | | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | | | REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | Pelaksana |
|---|------|---|---------|---|------------|--|------------|--|-----------|---|----|--|----|--|------------|--|--------|-------------|
| | | | | Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Dok | | - | | 0 | | | | | | | | - | | | Seksi PU |
| | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persen | 100 | - | 100 | | 100 | - | 100 | | 100% | | 0 | - | 0% | | |
| | | 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jenis | 1 | - | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi PU |
| | | 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jenis | 1 | - | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi PU |
| | | 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | 1 | - | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi PU |
| Sasaran-2 : Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | | | Persen | 100 | - | 100 | | 100 | - | 100 | | 100% | | 100 | - | 100% | | |
| | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persen | 100 | - | 100 | | 100 | - | 100 | | 100% | | 100 | - | 100% | | |
| | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Keg | 100 | - | 100 | | 100 | - | 100 | | 100% | | 100 | - | 100% | | |
| | | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Desa | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |
| | | 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |
| | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | lembaga | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 14 | - | 100% | | |
| | | 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | orang | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |
| | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | persen | 100 | 43.840.000 | 100 | 10.020.000 | 100 | 8.768.000 | 100 | | 100% | | 100 | 10.020.000 | 100% | 22,86% | |

| No | Kode | Program/Kegiatan | Satuan | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021 | | | | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | | | REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | Pelaksana |
|----|------|---|----------|---|-------------|--|------------|--|------------|---|------------|--|----|--|------------|--|--------|-----------------|
| | | | | Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | persen | 100 | 43.840.000 | 100 | | 100 | 8.768.000 | 100 | | 100% | | 100 | - | 100% | 0,00% | |
| | | 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 1 | - | 1 | | 1 | - | 1 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Trantibum |
| | | 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kegiatan | 1 | 43.840.000 | 1 | | 1 | 8.768.000 | 1 | | 100% | | 1 | - | 100% | 0,00% | Seksi Trantibum |
| | | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | kegiatan | 1 | - | 1 | 10.020.000 | 1 | - | 1 | | 100% | | 1 | 10.020.000 | 100% | | |
| | | 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | kegiatan | 1 | - | 1 | 10.020.000 | 1 | - | 1 | | 100% | | 0 | 10.020.000 | 0% | | Seksi Trantibum |
| | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | bulan | 12 | 100.250.000 | 12 | | 12 | 20.050.000 | 12 | 24.792.000 | 100% | | 12 | 24.792.000 | 100% | 24,73% | |
| | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | bulan | 12 | 100.250.000 | 12 | | 12 | 20.050.000 | 12 | 24.792.000 | 100% | | 12 | 24.792.000 | 100% | 24,73% | |
| | | 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | kegiatan | 1 | 100.250.000 | 1 | | 1 | 20.050.000 | 1 | 24.792.000 | 100% | | 1 | 24.792.000 | 100% | 24,73% | Seksi Kesra |

| No | Kode | Program/Kegiatan | Satuan | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021 | | | | TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | | | REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022 | | | | Pelaksana |
|----|------|---|----------|---|-------------|--|------------|--|------------|---|----|--|----|--|------------|--|--------|-------------|
| | | | | Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 7.01.05.2.01.02 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | orang | 70 | - | 70 | | 70 | - | 70 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Kesra |
| | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 100 | 145.750.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 29.150.000 | 100 | | 100% | | 100 | 10.000.000 | 100% | 6,86% | |
| | | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persen | 100 | 145.750.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 29.150.000 | 100 | | 100% | | 100 | 10.000.000 | 100% | 6,86% | |
| | | 7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kegiatan | 1 | 45.250.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 9.050.000 | 1 | | 100% | | 1 | 10.000.000 | 100% | 22,10% | Seksi Tapem |
| | | 7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Desa | 14 | 100.500.000 | 14 | | 14 | 20.100.000 | 14 | | 100% | | 14 | - | 100% | 0,00% | |
| | | 7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Desa | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |
| | | 7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |
| | | 7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Desa | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |
| | | 7.01.06.2.01.07 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | BPD | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |
| | | 7.01.06.2.01.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |
| | | 7.01.06.2.01.14 Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Desa | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |
| | | 7.01.06.2.01.16 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kegiatan | 14 | - | 14 | | 14 | - | 14 | | 100% | | 0 | - | 0% | | Seksi Tapem |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawangharjo

Sesuai dengan Keputusan Camat Tawangharjo nomor tahun 2022 Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan memiliki 2 IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN

| No | Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi Capaian | |
|----|--|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Tawangharjo | B | B (76,70) | B (77,20) | B (77,70) | B (78,70) | B (79,70) | B (85,00) | BB (88,75) | BB (88,76) | BB (88,77) |
| 2 | Nilai Sakip Kecamatan Tawangharjo | B | B (65,00) | B (68,00) | BB (70,00) | BB (72,00) | BB (73,50) | B | B | B (82,70) | B (82,99) |

Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi perolehan skor SAKIP Pemda tahun 2021 dengan kategori B diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas tingkat akuntabilitas /pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*resut oriented government*)..

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

| No | Kategori | Nilai Angka | Interprestasi |
|----|----------|-------------|---|
| 1 | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuskan |
| 2 | A | > 80 - 90 | Memuaskan, memimpin perubahan, pekerja tinggi dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | > 70 - 80 | Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal |
| 4 | B | > 60 - 70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan. |
| 5 | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar |
| 6 | C | > 30 - 50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistim untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar |
| 7 | D | > 0 - 30 | Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerpapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |

Sebagai perbandingan kami tampilkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 dan 2020 dengan predikat B yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih tetap memerlukan perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

| | | | Nilai | Nilai |
|---|-------------------------------|-------|-------|-------|
| | Komponen yang dinilai | Bobot | tahun | tahun |
| | | | 2019 | 2020 |
| A | Perencanaan Kinerja | 30 | 20,62 | 21,00 |
| B | Pengukuran Kinerja | 25 | 16,57 | 16,62 |
| C | Pelaporan Kinerja | 15 | 9,36 | 9,52 |
| D | Evaluasi Internal | 10 | 6,06 | 6,16 |
| E | Capaian Kinerja | 20 | 8,26 | 9,11 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 60,87 | 62,41 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B | B |

Sedangkan untuk kecamatan Tawangharjo bersama 18 kecamatan lainnya untuk saat ini belum dinilai oleh Kabupaten sehingga belum bisa mengisi capaian nilai/skor penilaian SAKIP dari Kabupaten. Namun upaya memperbaiki kinerja pelayanan di jajaran kecamatan Tawangharjo telah dilakukan dalam rangka bentuk tanggung jawab ikut menyukseskan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ;

- 2) Secara rutin dilakukan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam rentang waktu triwulanan dan tahunan;
- 3) Adanya penilaian setiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri terhadap SAKIP Pemda telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented government*.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari masing-masing seksi dan subbag sedikit terlambat; dan
 - 2) Belum adanya aplikasi yang integrated antara keuangan dan kinerja agar memudahkan proses dari sejak perencanaan hingga pelaporannya.
- b. Nilai /skor survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang telah dilakukan oleh Pemda merupakan skor survey yang diperoleh oleh OPD yang menjadi obyek pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,7 sementara realisasinya sebesar 88,75 melampaui target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target nilai kepuasan masyarakat secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi pelayanan publik; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya mekanisme reward and punishment yang baku untuk memacu percepatan peningkatan kualitas

pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten Grobogan; dan

- 2) Pelaksanaan survey masih bersifat sampel dan belum seluruh masyarakat yang dilayani ikut berpartisipasi.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tawangharjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum

- 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel

f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes

Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi beberapa isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung.
 - b. Kurangnya personel menjadikan banyaknya fungsi yang dirangkap sehingga output kinerja juga kurang maksimal.
 - c. Perlunya integrasi system dan data.
 - d. Koordinasi antar fungsi masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum Optimalnya verifikasi dan SPI (Sistem Pengendalian Internal).
 - b. Belum semua unit memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
3. Isu terkait pelayanan publik.
 - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh(komprehensif) di semua unit pelayanan.
 - b. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Tawangharjo
Kab.Grobogan

| No | | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Rancangan Awal RKPD 2024 | | Hasil Analisis Kebutuhan 2024 | |
|----|-----|---|---|---------|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | Target Capaian | Pagu Indikatif | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Rp | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Evaluasi SAKIP | Nilai | 70 | 2.633.687.200 | 70 | 9.133.687.200 |
| | | | Laporan Keuangan Sesuai SAP | % | 100 | | 100 | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | | 100 | |
| | | | Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko | % | 60 | | 60 | |
| | 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas | % | 100 | - | 100 | - |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun | | 1 | | 1 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun | | 1 | | 1 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun | | 1 | | 1 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun | | 1 | | 1 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen LKjIP tersusun | | 1 | | 1 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun | | 1 | | 1 | |
| | 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | % | 100 | 2.015.619.200 | 100 | 2.015.619.200 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | bulan | 14 | 2.015.619.200 | 14 | 2.015.619.200 |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu | bulan | 12 | - | 12 | - |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | dokumen | 12 | - | 12 | - |
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun | | 12 | - | 12 | - |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun | dokumen | 12 | - | 12 | - |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | dokumen | 12 | - | 12 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|---------|-----|-------------|-----|---------------|
| | 1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik | % | 100 | - | 100 | - |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun | dokumen | 10 | - | 10 | - |
| | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan | unit | 111 | - | 111 | - |
| | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | orang | 14 | - | 14 | - |
| | 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu | % | 100 | 14.500.000 | 100 | 14.500.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan | stel | 30 | - | 30 | - |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | stel | 30 | 14.500.000 | 30 | 14.500.000 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 30 | - | 30 | - |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 30 | - | 30 | - |
| | 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 236.057.000 | 100 | 236.057.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | unit | 35 | 7.215.000 | 35 | 7.215.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | unit | 10 | - | 10 | - |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | unit | 10 | - | 10 | - |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | unit | 20 | 79.140.000 | 20 | 79.140.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | unit | 10 | 13.690.000 | 10 | 13.690.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | unit | 12 | 12.600.000 | 12 | 12.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan/Material yang disediakan | unit | 20 | 38.472.000 | 20 | 38.472.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | 40 | 84.940.000 | 40 | 84.940.000 |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan | unit | | | | |
| | 1.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | % | 100 | 62.981.000 | 100 | 6.562.981.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan | unit | | | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan | unit | | | | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | unit | 10 | - | 10 | - |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | unit | 10 | 62.981.000 | 10 | 62.981.000 |
| | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan | unit | 10 | - | 10 | - |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|-------|-----|-------------|-----|---------------|
| | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan | unit | | - | | - |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun | unit | 1 | - | 1 | 6.500.000.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | unit | 1 | - | 1 | - |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | unit | 1 | - | 1 | - |
| | 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 161.661.000 | 100 | 161.661.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia | bulan | 12 | 72.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | 12 | 18.500.000 | 12 | 18.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bulan | 12 | 7.692.000 | 12 | 7.692.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | bulan | 12 | 63.469.000 | 12 | 63.469.000 |
| | 1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara | % | 100 | 142.869.000 | 100 | 142.869.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara | unit | 6 | 21.891.000 | 6 | 21.891.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel terpelihara | unit | 50 | - | 50 | - |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | unit | 12 | 11.778.000 | 12 | 11.778.000 |
| | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara | unit | 12 | - | 12 | - |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | unit | 1 | 109.200.000 | 1 | 109.200.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | unit | 1 | - | 1 | - |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | unit | 1 | - | 1 | - |
| 2 | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap | % | 100 | 20.639.000 | 100 | 40.000.000 |
| | 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi | % | 100 | 20.639.000 | 100 | 40.000.000 |
| | | 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan) | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | Kali | 1 | 20.639.000 | 1 | 40.000.000 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|-----------|-----|-----------|-----|
| | 2.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah | % | - | - | - |
| | | 7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb) | Dok | | | |
| | | 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah indikator SPM yang didata | Indikator | | | |
| | | 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersusunnya dokumen SKM | Dok | | | |
| | 2.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan | % | 100 | - | 100 |
| | | 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan | Jenis | 1 | - | 1 |
| | | 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan | Jenis | 1 | - | 1 |
| | | 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan | | 1 | - | 1 |
| 3 | | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga masyarakat aktif | Persen | 100 | - | 100 |
| | 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa | Keg | 100 | - | 100 |
| | | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes | Desa | 14 | - | 14 |
| | | 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb) | | 14 | - | 14 |
| | 3.2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan | lembaga | 14 | - | 14 |
| | | 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas | orang | 14 | - | 14 |
| 4 | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif | persen | 100 | 8.768.000 | 100 |
| | 4.1 | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | persen | 100 | 8.768.000 | 100 |
| | | 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam | Kegiatan | 1 | - | 1 |
| | | 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah kegiatan koordinasi FKUB | Kegiatan | 1 | 8.768.000 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|----------|-----|------------|-----|------------|
| | 4.2 | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | kegiatan | 1 | - | 1 | - |
| | | 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum | kegiatan | 1 | - | 1 | - |
| 5 | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | bulan | 12 | 20.050.000 | 12 | 20.050.000 |
| | 5.1 | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | bulan | 12 | 20.050.000 | 12 | 20.050.000 |
| | | 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | kegiatan | 1 | 20.050.000 | 1 | 20.050.000 |
| | | 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti bintek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | orang | 70 | - | 70 | - |
| 6 | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa dengan tertib administrasi | | 100 | 29.150.000 | 100 | 29.150.000 |
| | 6.1 | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa dengan tertib administrasi | % | 100 | 29.150.000 | 100 | 29.150.000 |
| | | 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kegiatan | 1 | 9.050.000 | 1 | 9.050.000 |
| | | 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Desa | 14 | 20.100.000 | 14 | 20.100.000 |
| | | 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Desa | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Desa | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah BPD yang dibina | BPD | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi Tupoksinya | Lembaga | 14 | - | 14 | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|----|---------------|----|---------------|
| | | 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga) | Desa | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kegiatan | 14 | - | 14 | - |
| | | | | | | 2.712.294.200 | | 9.251.655.200 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2023 terdapat usulan khusus masyarakat yang masuk terkait dengan Pengadaan Gedung kantor kecamatan di lahan milik Kecamatan Tawangharjo yang berlokasi di eks Kawedanan di sebelah selatan pasar Kuwu yang lahannya lebih luas, lebih representative sekaligus memungkinkan terdapat RTH (ruang terbuka hijau) serta sport center yang terbuka untuk masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan yang menjadi Acuan/Pedoman

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah pada tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2024 yaitu: **“Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi”**. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur. Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaransasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini meliputi:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi

program Generasi Terencana

- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
- 8) Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
- 9) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
- 10)Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN

Sedangkan bila dilihat dari sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana teruraikan dalam table 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

| No | Sasaran Pembangunan Daerah | Indikator Sasaran | Target |
|----|---|---|-------------------------|
| 1 | Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing Pendidikan | Harapan Lama Sekolah | 12,34 tahun |
| | | Rata-rata lama Sekolah | 7,04 tahun |
| 2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | 75,14 tahun |
| 3 | Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak | Tingkat Capaian APE | Madya (0,6375 – 0,7724) |
| 4 | Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah | Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik | 87,22% |
| | | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | 92,34% |
| | | Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni | 76,07 % |
| | | Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio) | B (0,20- 0,44) |
| 5 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3 | Indeks Kualitas Air | Indeks 80,10 |
| | | Indeks Kualitas Udara | Indeks 87,15 |
| | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks 62,75 |

| | | | |
|----|---|---|------------------------|
| | | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Indeks 46,00 |
| 6 | Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks 0,68 |
| 7 | Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,23 %/tahun |
| | | Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 0,5 %/tahun |
| | | Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan | 1,59 %/tahun |
| | | Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD | 1,47 persen |
| 8 | Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional | Nilai investasi di daerah | 870,467 Milyar Rupiah |
| 9 | menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa | Indeks Desa Membangun | Indeks 0,70 |
| 10 | Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Persentase Penurunan PPKS | 1,4 %/tahun |
| 11 | Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,2 % |
| 12 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni | Rata-rata nilai IKM | Kategori B (77,70) |
| | | Indeks Inovasi Daerah | Indeks Sangat Inovatif |
| 13 | Meningkatnya penerapan egovernment yang terintegrasi | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks 3,3 |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan | Nilai SAKIP | Nilai B (70) |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| | serta pengawasan | | |
| | | Level Maturitas SPIP | Level 3 (3,1) |
| | | Opini BPK | Opini WTP |
| | | Indeks sistem merit | Kategori III (250) |
| 13 | Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah | Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan | 73,85 % |
| 14 | Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum | Persentase Toleransi antar umat beragama | 100% |
| | | Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani | 100% |

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tawangharjo

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kecamatan Tawangharjo dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Tawangharjo Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan maka tujuan Renja Kecamatan Tawangharjo tahun 2024 adalah :

“ Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ”

3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Kecamatan Tawangharjo dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Kecamatan Tawangharjo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan
Tahun 2024

| No | Sasara n | Indikat or | Target |
|----|--|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Nilai IKM | Nilai B (77,70) |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan di kecamatan | Nilai SAKIP (Penilaian tim Kabupaten) | BB (70) |

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Tawangharjo akan melaksanakan 6 program, 17 kegiatan, dan 72 sub kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 6) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7) Pemeliharaan Mebel
- 8) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 9) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)

g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b.) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa
- 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 8) Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
- 9) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tawangharjo tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2023 dan Prakiraan Maju 2024
Kecamatan Tawangharjo

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--|--|---|--|---|--------|---|---------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| KECAMATAN TAWANGHARJO | | | | | | | 2.979.744.000 | | 9.251.655.200 |
| Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | | Nilai IKM | | | 82,99 | | 83,29 | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Evaluasi SAKIP | Nilai SAKIP | Nilai | 68 | 2.832.744.000 | 70 | 9.133.687.200 |
| | | | Laporan Keuangan Sesuai SAP | | % | 100 | | 100 | |
| | | | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah | | % | 100 | | 100 | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|---|--|--------|---|----|---------------------------|----|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | | Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko | | % | 40 | | 60 | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100 | % | 100 | - | 100 | - |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun | | | 1 | - | 1 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun | | | 1 | | 1 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun | | | 1 | | 1 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun | | | 1 | | 1 | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|---|---|----------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | targ et | Rp | targ et | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen LKJIP tersusun | | | 1 | | 1 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun | | | 1 | | 1 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100 | % | 100 | 1.906.544.000 | 100 | 2.015.619.200 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | | bulan | 14 | 1.906.544.000 | | 2.015.619.200 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|---|---|---------|---|----|---------------------------|----|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu | | bulan | 12 | - | 12 | - |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | dokumen | 12 | - | 12 | - |
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun | | | 12 | - | 12 | - |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|---|---|----------|---|----------|---------------------------|----------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun | | dokumen | 12 | - | 12 | - |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | dokumen | 12 | - | 12 | - |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik | Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi dalam aplikasi (SIM Aset) dibagi jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100 | % | 100 | - | 100 | - |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun | | dokumen | 10 | - | 10 | - |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|--|--|----------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | targ et | Rp | targ et | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan | | unit | 111 | - | 111 | - |
| | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | orang | 14 | - | 14 | - |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100 | % | 100 | 52.000.000 | 100 | 14.500.000 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan | | stel | 30 | - | 30 | - |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|--|--|----------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | stel | 30 | 22.000.000 | 30 | 14.500.000 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | orang | 30 | - | 30 | - |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | orang | 30 | 30.000.000 | 30 | - |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100 | % | 100 | 241.700.000 | 100 | 236.057.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|--|---|--------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | | unit | 35 | 8.000.000 | 35 | 7.215.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | unit | 10 | - | 10 | - |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | | unit | 10 | - | 10 | - |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | | unit | 20 | 80.000.000 | 20 | 79.140.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | | unit | 10 | 14.500.000 | 10 | 13.690.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | | unit | 12 | 13.200.000 | 12 | 12.600.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|---|---|--------|---|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | targ et | Rp | targ et | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan/Material yang disediakan | | unit | 20 | 40.000.000 | 20 | 38.472.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | kali | 40 | 86.000.000 | 40 | 84.940.000 |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan | | unit | | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100 | % | 100 | 226.000.000 | 100 | 6.562.981.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|--|---|--------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | targ et | Rp | targ et | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan | | unit | | 40.000.000 | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan | | unit | | | | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | | unit | 10 | 75.000.000 | 10 | - |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | | unit | 10 | 36.000.000 | 10 | 62.981.000 |
| | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan | | unit | 10 | - | 10 | - |
| | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan | | unit | | - | | - |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|---|---|----------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun | | unit | 1 | - | 1 | 6.500.000.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | | unit | 1 | 75.000.000 | 1 | - |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | | unit | 1 | - | 1 | - |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100 | % | 100 | 169.500.000 | 100 | 161.661.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|---|--|----------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | targ et | Rp | targ et | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia | | bulan | 12 | 76.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | bulan | 12 | 18.500.000 | 12 | 18.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | bulan | 12 | 10.000.000 | 12 | 7.692.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | | bulan | 12 | 65.000.000 | 12 | 63.469.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100 | % | 100 | 237.000.000 | 100 | 142.869.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|--|---|--------|---|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara | | unit | 6 | 22.000.000 | 6 | 21.891.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel terpelihara | | unit | 50 | - | 50 | - |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | | unit | 12 | 15.000.000 | 12 | 11.778.000 |
| | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara | | unit | 12 | - | 12 | - |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | | unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 109.200.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|--|---|--------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | | unit | 1 | - | 1 | - |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | | unit | 1 | - | 1 | - |
| | | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap | Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 | % | 100 | 44.000.000 | 100 | 40.000.000 |
| | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi | Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang | % | 100 | 26.000.000 | 100 | 40.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|--|---|--------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | | | mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100 | | | | | |
| | | 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan) | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | | Kali | 1 | 26.000.000 | 1 | 40.000.000 |
| | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan dan dapat dilaksanakan dibagi jumlah urusan yang dilimpahkan ke kecamatan dikali 100 | % | 100 | - | | - |
| | | 7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb) | | Dok | 12 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|---|---|-----------|---|------------|---------------------------|----|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | targ et | Rp | targ et | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | 7.01.02.2.02.02 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah indikator SPM yang didata | | Indikator | 12 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersusunnya dokumen SKM | | Dok | 12 | | | |
| | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah yang dilimpahkan dikali 100 | % | 100 | 18.000.000 | 100 | - |
| | | 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan | | Jenis | 1 | 18.000.000 | 1 | - |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---|--|---|--|--------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | targ et | Rp | targ et | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan | | Jenis | 1 | - | 1 | - |
| | | 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan | | | 1 | - | 1 | - |
| | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga masyarakat aktif | Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (Kecamatan dan Kelurahan/Desa) dikali 100 | Persen | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|---|--|--------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa | Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat dikali 100 | Keg | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 |
| | | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes | | Desa | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb) | | | 14 | 20.000.000 | 14 | 20.000.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|--|---|---------|---|------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan | Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dikali 100 | lembaga | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas | | orang | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif | Jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) aktif dibagi jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) Aktif | persen | 100 | 22.000.000 | 100 | 8.768.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|---|---|----------|---|------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | targ et | Rp | targ et | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dikali 100 | persen | 100 | 22.000.000 | 100 | 8.768.000 |
| | | 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam | | Kegiatan | 1 | 12.000.000 | 1 | - |
| | | 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah kegiatan koordinasi FKUB | | Kegiatan | 1 | 10.000.000 | 1 | 8.768.000 |
| | | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah pelaksanaan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan | kegiatan | 1 | - | 1 | - |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|--|--|----------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | targ et | Rp | targ et | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Kepala Daerah yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dikali 100 | | | | | |
| | | 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum | | kegiatan | 1 | - | 1 | - |
| | | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 | bulan | 12 | 21.000.000 | 12 | 20.050.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|--|--|---|----------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 | bulan | 12 | 21.000.000 | 12 | 20.050.000 |
| | | 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | | kegiatan | 1 | 21.000.000 | 1 | 20.050.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|---|--|----------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | 7.01.05.2.01.02 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti bintek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | orang | 70 | - | 70 | - |
| | | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa dengan tertib administrasi | Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100 | | 100 | 40.000.000 | 100 | 29.150.000 |
| | | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa dengan tertib administrasi | Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100 | % | 100 | 40.000.000 | 100 | 29.150.000 |
| | | 7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | Kegiatan | 1 | 20.000.000 | 1 | 9.050.000 |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|--|---|--------|---|------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | 7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | Desa | 14 | 20.000.000 | 14 | 20.100.000 |
| | | 7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | Desa | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | Desa | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | Desa | 14 | - | 14 | - |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--------|---------|---|---|---|----------|---|----|---------------------------|----|
| | | | | | | Anggaran Tahun 2023 | | Prakiraan Maju Tahun 2024 | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp |
| | | | | | | | | | |
| | | 7.01.06.2.01.07 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah BPD yang dibangun | | BPD | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi Tupoksinya | | Lembaga | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.14 Fasilitas Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga) | | Desa | 14 | - | 14 | - |
| | | 7.01.06.2.01.16 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | Kegiatan | 14 | - | 14 | - |

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Kecamatan Tawangharjo Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Tawangharjo tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Tawangharjo Tahun 2023 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2024 Renja Kecamatan Tawangharjo terdiri dari 6 program, 17 kegiatan, dan 72 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 9.251.655.200 (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Rancangan Awal Renja Kecamatan Tawangharjo Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman awal yang pada tahapan selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi Rancangan Renja dan terakhir menjadi Renja yang bermanfaat bagi Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu

didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

CAMAT TAWANGHARJO

JOKO SUPRIYANTO, S.STP, MH
NIP.19970101 199703 1 004